

## **PERANAN MORAL DALAM SISTEM POLITIK INTERNASIONAL YANG ANARKI**

### **A. Manusia, Politik dan Moral.**

Manusia adalah makhluk yang bermoral. Hal ini menjadi sesuatu yang mulai kabur dan berubah dalam hal keilmuan, maka perlu adanya usaha untuk mengurangi masalah-masalah moral menjadi masalah-masalah ilmiah. Morgenthau menyatakan bahwa manusia adalah binatang yang berpolitik secara alami, dan juga bermoral. Manusia lahir untuk mencari kekuasaan, dan kondisi ini pula yang membuatnya menjadi budak bagi kekuatan yang lain, tetapi di manapun ia ingin menjadi yang diatas. Di luar pertentangan antara keinginan manusia dengan kondisi yang sebenarnya itu timbul isu moral dari kekuasaan, masalah yang memberikan dan membatasi kekuasaan manusia terhadap manusia lainnya. Karena itu sejarah dari pemikiran politik adalah sejarah dari evolusi moral dari kekuatan politik.

Manusia bertindak secara berbeda dalam dunia politik dan dalam bidang pribadi, karena etika membolehkannya untuk bertindak secara berbeda. Maksudnya manusia mempunyai etika dalam bidang politik dan ada etika lain untuk tujuan dan membuat ketentuan bagi hubungan di antara manusia itu sendiri. Hal ini tidak mungkin dilakukan karena tidak adanya standar objektif atas kebahagiaan dan kesengsaraan. Untuk itu digunakan analisis hubungan *means-end*. Walaupun dalam hubungan ini juga tidak ada keobjektifan. Kant dan Marx mengutuk tindakan penggunaan manusia sebagai *means* untuk suatu *end* bagi yang lain. Tetapi hubungan *means-end* itu sendiri adalah ambigu dan relatif. Apa yang kita sebut dengan *end* akan menjadi *means* untuk tindakan selanjutnya. Jadi semua tindakan-tindakan pada waktu yang sama merupakan *end* dan *means*. Sesuatu yang jelas adalah bahwa semua tindakan manusia muncul sebagai *means* untuk suatu tujuan yang terakhir.

Tindakan individu atau politik, bagaimanapun itu selalu individu yang bertindak, apakah itu untuk tujuannya sendiri ataupun untuk tujuan bersama atau masyarakat. Tindakan individu ini merupakan kapasitas atas tindakan yang dapat melebihi atau kurang bermoral dalam bertindak terhadap yang lainnya. Suatu oposisi antara manusia dan masyarakat, antara tindakan pribadi dan tindakan politik, diturunkan atau dikurangi bagi oposisi antara perbedaan macam-macam dari tindakan-tindakan individu. Hal itu menjadi jelas dalam karakter moral dua macam tindakan adalah suatu relatif yang terbaik dan tanpa ketidak mutlakan, di mana doktrin kontemporer menghubungkannya.

Individu akan melakukan suatu tindakan untuk mencapai tujuannya. Hal itu dilakukan untuk memenuhi kepuasan dan kelangsungan hidupnya. Individu untuk mendapatkan keinginan yang terbatas akan dapat membawanya untuk mendapatkan kekuasaan dalam negara, karena sebagai individu ada hal-hal yang tidak diperbolehkan ia melakukannya. Jika hal itu dilakukan semata-mata untuk kepentingan pribadi, adalah merupakan suatu kejahatan. Inpuls dari etika dan negara tidak membolehkan individu untuk memuaskan kepentingannya sendiri.

## **B. Tindakan Politik dan Moral Suatu Negara.**

Dalam negara, dengan menghindari suatu tindakan politik, karena tidak adil, seorang pefeksionis tidak melakukan apa-apa, tetapi menggantinya dengan suatu ketidakadilan bagi yang lain, yang mungkin lebih parah dari bentuknya. Ini dilakukan karena sebenarnya ia tidak ingin melakukan kejahatan sama sekali, tetapi hal itu dapat menjadi suatu kejahatan baru. Ini hanya akan menjadikan suatu kehadiran yang tragis dari kejahatan yang tidak disadari dalam semua tindakan politik di mana setidaknya memungkinkan manusia untuk memilih suatu kejahatan yang lebih rendah.

Tidak ilmu, ataupun etika, ataupun politik dapat memecahkan konflik antara politik dan etika menjadi suatu yang harmonis. Kita tidak mempunyai pilihan antara kekuasaan dan keadaan yang baik. Untuk bertindak secara sukses,

termasuk dari seni berpolitik, adalah kebijakan politik. Untuk mengetahui dengan keputusan bahwa tindakan politik tidak dapat dihindarkan dari kejahatan, dan untuk bertindak meskipun adalah keberanian moral. Untuk memilih di antara beberapa tindakan yang berguna adalah keputusan yang bermoral. Dalam kombinasi kebijakan politik, keberanian moral, dan keputusan moral, manusia merekonsiliasikan alam politiknya dengan takdir moralnya.

Tindakan individu yang menjadi tindakan politik suatu negara akan menjadi suatu tindakan politik internasional. Hal ini terjadi karena antara negara-negara di dunia melakukan hubungan sesamanya. Politik internasional ini berlangsung dalam suatu sistem internasional yang bersifat anarki, karena tidak adanya suatu pemerintahan tertinggi atau wewenang tertinggi di antara negara-negara di dunia. Dalam sistem internasional adanya pengakuan terhadap kedaulatan suatu negara.

Dalam realita, politik internasional adalah sebuah dunia laki-laki. Dahulu wanita jarang terlibat sebagai diplomat-diplomat professional atau militer. Begitu pula dengan spesialisasi hubungan internasional dan keamanan. Kalaupun ada mereka hanya memfokuskan diri dalam ekonomi politik internasional, hubungan utara dan selatan, dan masalah-masalah keadilan distributive. Hal itu merupakan diskriminasi bagi kaum wanita, walaupun sekarang di Amerika Serikat sudah banyak wanita masuk dalam urusan militer dan pelayanan luar negeri. Kaum realisme menyatakan bahwa hubungan internasional berdasarkan pada pandangan dunia maskulin seperti yang diungkapkan Morgenthau dalam bukunya *Politic Among Nations* tentang 6 prinsip-prinsip dari realisme politik. Ini merupakan deskripsi dari politik internasional berdasarkan asumsi tentang *human nature* yang sebagian dan hak istimewa maskulinitas. Morgenthau menyatakan bahwa mungkin saja untuk mengembangkan teori rasional dari politik internasional berdasarkan hukum objektif yang berakan pada *human nature*. Ilmu objektif dari politik internasional berdasarkan model dari ilmu alam menjadi bagian penting dari agenda realis dan neo realis.

Hal ini mendapat reaksi dari kaum feminis. Hampir semua teori-teori

feminis menyatakan bahwa maskulinitas dan femininitas mengacu pada katagori gagasan social yang berbeda dalam waktu dan tempat daripada factor biologi. Feminis secara umum skeptical tentang kemungkinan dari penemuan sebuah fondasi universal dan objektif, di mana Morgenthau mengklaim bahwa itu mungkin saja dapat dilakukan.

Kebutuhan untuk mengontrol telah menjadi motivasi penting kekuasaan bagi realisme modern. Untuk memulai pencariannya bagi keobjektifan, teori rasional dari politik internasional, Morgenthau membentuk sebuah abstraksi yang disebutnya dengan *political man*. Morgenthau menyadari bahwa laki-laki seperti negara adalah moral dan bersifat binatang, tetapi negara tidak meninggalkan hukum moral universal yang memerintah secara universal, yang secara moral mempunyai politik internasional dihukum atas kegagalan karena tindakan amoralnya terhadap yang lain. Untuk memecahkan ketegangan ini Morgenthau mendalilkan sebuah bidang dari politik internasional, di mana pendekatan amoral dari *political man* tidak hanya diperbolehkan, tetapi sesuatu yang bijaksana. Negara dapat melakukan tindakan yang tidak manusiawi untuk kelangsungan hidup, tergantung pada kemaksimalan dari kekuasaan dan ketidakmauan untuk pertarungan.

### **C. Pandangan Kaum Feminis Mengenai Politik Internasional.**

Kaum feminis melawan pengkotak-kotakan manusia secara kontras dalam hal ras, gender atau kelas, dan dapat menjadi proyek dari dominasi social. Kaum feminis tidak suka akan dikotomisasi dan menjauhkan subjek dari objek yang berlangsung dengan pikiran abstrak. Kaum feminis memberikan formulasi baru terhadap formulasi yang diberikan Morgenthau. Di antaranya; hukum objektif dari *human nature* sebagian dari pandangan maskulin, di mana *human nature* merupakan maskulin dan feminine dan termasuk elemen reproduksi dan perkembangan seperti dominasi politik, objektifitas dinamik memberikan pandangan yang lebih berhubungan dari objektifitas dengan sedikit potensi bagi

dominasi. Feminis percaya bahwa kepentingan nasional adalah sesuatu yang multi dimensi dan kontekstual yang lebih meminta kerjasama daripada solusi *zerosum* dalam masalah-masalah global yang independen. Power sebagai dominasi dan kontrol istimewa kaum maskulin dan mengabaikan kemungkinan dari kekuasaan bersama, tidak dapat dimasukkan ke dalam sesuatu yang universal, karena aspek lain dari power juga sering dihubungkan dengan femininitas. Kaum feminis juga menolak kemungkinan untuk mengenyampingkan moral dalam tindakan politik. Apabila aspirasi moral tidak dapat disamakan dengan prinsip-prinsip moral universal, perspektif feminis mencari jalan dengan menemukan elemen-elemen moral umum dalam aspirasi manusia dalam pemecahan konflik internasional dan pembangunan komunitas internasional. Selain itu kaum feminis menyangkal otonomi politik.

Pengabaian moral dalam tindakan politik, apalagi sampai melakukan tindakan penindasan, ditinjau dari hak seorang manusia sangatlah tidak tepat. Setiap manusia terlahir ke dunia mempunyai haknya masing-masing, yang disebut sebagai hak azasi manusia. Hak azasi manusia mengandung suatu kesederhanaan, karena hak ini menyangkut manusia sebagai *human being*. Tetapi dalam implementasinya tidak sesederhana pengertiannya. Hak mempunyai dua kepentingan moral, di satu sisi, ‘ hak ‘ dapat mengacu pada sesuatu yang tepat atau dituntut, suatu fakta dari sesuatu yang benar. Dalam hal ini ‘ hak ‘ mengacu pada suatu standar moral; kebenaran moral *rectitude*. Di sisi lain, ‘ hak ‘ mengacu pada pemberian istilah yang bagus atau kesempatan pada seseorang.

Pengertian dari standar moral, sama tuanya dengan ide dari standar-standar moral itu sendiri. Pengertian dari hak yang paling terkenal adalah teori hukum alam, yang menyatakan hukum moral objektif (diberikan oleh Tuhan dan atau dipahami sebagai alasan manusia). Hukum alam ini mengikat semua pria dan wanita dan memberikan suatu standar untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan manusia termasuk kegiatan politik. Suatu rezim yang melanggar atau melampaui hukum alam merupakan kejahatan serius, kehilangan moralnya dan legitimasi politik.

Kembali ke masalah tindakan politik yang mengabaikan moral, tentu hal itu sangat bertentangan dengan hak azasi manusia. Setiap manusia berhak melakukan tindakan, baik itu individu maupun tindakan politik, tetapi tindakan itu sama sekali tidak boleh melanggar hak azasi manusia. Setiap manusia mempunyai hak untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraannya, tetapi dalam melakukan tindakannya juga harus memperhatikan hak orang lain, dalam hal ini tentu berkaitan dengan moral yang dimiliki seseorang. Hak manusia dapat diatur atau dilegitimasi oleh negara dalam undang-undang negaranya, agar suatu hak tidak menjadi bencana atau penderitaan bagi yang lainnya. Negara pun dalam melakukan tindakan politiknya juga harus memperhatikan hak azasi manusia setiap penduduknya. Moral yang dimiliki pemerintah dalam pengaturan negara akan menjelma dalam suatu kebijakan politik luar negeri yang sesuai dengan moral dan hak azasi manusia.

Dalam sistem internasional yang anarki, tentu moral itu juga mempunyai kedudukan yang harus diperhatikan. Sistem internasional yang anarki, di mana tidak ada pemerintah tunggal di dunia atau wewenang yang tertinggi dari suatu negara, memang akan sedikit lebih sulit dalam melakukan tindakan politik yang tidak bertentangan dengan moral, karena tidak ada unsur pemaksa. Tetapi moral juga sangat berpengaruh dalam tindakan politik internasional. Moral dalam setiap negara akan mempengaruhi tindakan politiknya terhadap negara lain.

Etika dan tindakan politik mungkin saja sulit sejalan dengan harmonis dalam penerapannya, tetapi tindakan politik tidak boleh bertentangan dengan hak azasi manusia. Hal ini secara internasional sesungguhnya telah diakui, melalui *The Universal Declaration of Human Right* yang diproklamkan oleh *United Nations General Assembly* tahun 1948. PBB sebagai institusi dunia dapat menjadi pengawas demi terjaminnya hak azasi ini. Hal ini tentu tidak boleh pula melanggar kedaulatan dari suatu negara. Pelaksanaan ini berdasarkan kesamaan umum dan universal dari hak azasi manusia yang seyogianya diakui oleh setiap negara. Karena itu maka etika dan moral dalam tindakan politik dalam sistem internasional tidak dapat diabaikan begitu saja. Karena moral yang diabaikan akan

dapat menjadi pelanggaran hak azasi manusia, dan hal itu merupakan kejahatan terhadap manusia atau bangsa. Kejahatan inilah yang dapat diambil tindakan oleh PBB dalam rangka mencapai perdamaian dunia.

Dapat disimpulkan bahwa, walaupun sistem internasional bersifat anarki, tetapi itu bukan berarti suatu negara dapat mengabaikan moral dalam melakukan tindakan politik dalam sistem internasional. Moral ini akan dapat berperan sebagai pembentuk komunitas internasional yang mengglobal, dan menghasilkan kerjasama yang baik dalam hubungan internasional. Akhir dari semua tindakan itu ditujukan untuk perdamaian dan kesejahteraan masyarakat dunia. Tetapi perlu diingat, moral juga dapat menimbulkan *humanitarian intervention* dari suatu negara terhadap negara lain dengan mengatasnamakan moral.

## DAFTAR PUSTAKA

- Baylis and Smith, 2001. *The Globalization of World Politic*, Edisi Kedua. Oxford: Oxford University Press.
- Burchill and Linklater. 1996. *Theories of International Relations*. United States of America: ST. Martin's Press. INC.
- Morgenthau, Hans J. 1993. *Politic Among Nations : The Struggle for Power and Peace Brief Edition*. United States : McGraw-Hill.
- Nasution, Drs. Dahlan, Dipl, IR. 1988. *Perang Atau Damai Dalam Wawasan Politik Internasional*. Bandung : CV Remaja Karya.



## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i.
DAFTAR ISI.....	ii.
A. Manusia, Politik dan Moral.....	1
B. Tindakan Politik dan Moral Suatu Negara.....	2.
C. Pandangan Kaum Feminis Mengenai Politik Internasional.....	4.
DAFTAR PUSTAKA.....	8.

**PERANAN MORAL DALAM SISTEM INTERNASIONAL  
YANG ANARKI**

**MAKALAH**

**Dewi Utariah.  
NIP. 131 121 138**

**UNIVERSITAS PADJADJARAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL  
JATINANGOR**

2007

## KATA PENGANTAR

Manusia adalah makhluk bermoral, hal ini menjadi sesuatu yang mulai kabur dan berubah dalam hal keilmuan. Untuk itu diperlukan usaha mengurangi masalah-masalah moral menjadi masalah-masalah ilmiah.

Morgenthau mengatakan bahwa manusia adalah binatang yang berpolitik secara alami dan juga bermoral. Manusia lahir untuk kekuasaan dan kondisi manusia juga membuatnya menjadi budak bagi kekuatan yang lain, tetapi dimanapun ia ingin menjadi yang diatas.

Diluar pertentangan antara keinginan manusia dengan kondisi yang sebenarnya itu, timbul isu moral dari kekuasaan, masalah yang memberikan dan membatasi kekuasaan manusia terhadap manusia lainnya.

Karena itu sejarah dari pemikiran politik adalah sejarah dari evolusi moral dan kekuatan politik.

Dalam sistem internasional yang anarki moral juga mempunyai kedudukan yang harus diperhatikan.

Makalah ini menggambarkan bahwa etika dan tindakan politik sulit sejalan dan harmonis, tetapi tindakan politik tidak boleh bertentangan dengan hak asasi manusia.

Seoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi mereka yang yang memerlikannya sebagai referensi.

September, 2007

Penulis,

DewiUtariah.

